

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum oleh Debitor*, (Jakarta: PT Pilar Yustinus Ultima, 2015).
- Aristo Ervandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, “Pembangunan Sistgem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Politik Bangsa”, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 88-98.
- Ediwarman. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. (Medan: Sofmedia, 2015)
- Erman Radjagukguk. *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi*. (Depok: Universitas Indonesia, 1997)
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014)
- Herawati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan “Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT*, (Yogyakarta: LaksBang, 2008)
- J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2000)
- John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Joko Sriwidodo dan M. S. Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2024)
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 4 tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, (Bandung: Alumni, 2006)
- P. M. Rondonuwu, *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, Cetakan ke-2, (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2015)

Suparji, *Kepailitan*, (Jakarta: UAI Press, 2018)

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Memahami Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2019)

Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015)

T. R. S. Allan, *The Sovereignty of Law: Freedom, Constitution, and Common Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2013)

Wisnu Agung Nugroho, Citranu, Mia Amalia, Ika Fitriana, Elias Hence Thesia, Moh. Mujibur Rohman, Asti Dwiyantri, Erman Rahim, Hidayati Fitri, Opniel Harsana BP, *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)*, (Kota Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

Yamin dan Utji Sri Wulan Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014)

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Kota Gorontalo: Ideas Publishing, 2019)

Jurnal

Aria Alim Wijaya, Rilda Murniati, dan M. Wendy Trijaya, “Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan dalam Kepailitan”, *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 3, 2019, 713-724

Fadila Ilaina Rokhma dan Made Warka, “Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur yang Masih Dalam Sengketa”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 3, 2023, 2784-2798

Fransiska Adelina, “Celah Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kurator pada Masa Insolvensi”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, 2018, 115-132

Gunawan Widjaja, “Wewenang, Pelimpahan Wewenang dan Akibat Hukumnya dalam Konsepsi Hukum Perdata”, *Jurnal Alwatzikhoebillah*, Vol. 9, No. 2, 2023, 310-319

Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law”, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4, 2020, DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>. 392-408

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019. 13-22

Muhammad Bayu Hermawan, “Aspek Hukum Kepailitan Terhadap Perusahaan Teknologi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Konkuren”, Tesis, Jakarta: Magister Hukum Universitas Trisakti, 2019

Nor Fadillah, “Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik”, Vol. 8, No. 1, 2023, 1-19

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Perindustrian/Pertambangan Milik Belanda, 1959

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Leces, 1961

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), 1982

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, 1996

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, 1999

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004

Putusan

Pengadilan Niaga Surabaya, Putusan Perdamaian (Homologasi) Putusan Nomor: 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, 2014

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1/Pdt.Sus.PembatalanPerdamaian/2018/PN.niaga.Sby, 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, 2020

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Kasasi Nomor: 1/K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tentang Pemohon Kasasi PT Perusahaan Pengelola melawan Anggi Gitaharani dan kawan kawan selaku Tim Kurator PT Kertas Leces (persero) (dalam pailit), 2020

Website/Internet

Albertus M. Prestianta & Dupla Kartini, “Roda produksi Kertas Leces kembali bergulir”, <https://industri.kontan.co.id/news/roda-produksi-kertas-leces-kembali-bergulir> diakses pada tanggal 10 Mei 2024

CNN Indonesia, “PPA Protes Jatah Bagi Harta Pailit Kertas Leces Hanya Rp1,2 M”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190909163446-92-428837/ppa-protes-jatah-bagi-harta-pailit-kertas-leces-hanya-rp12-m> diakses pada tanggal 12 Mei 2024

Djulianto Susantio, “Pabrik Kertas Leces, Dulu Pernah Jaya di ASEAN, Kini Bangkrut”, <https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/5fea89928ede48740b413212/pabrik-kertas-leces-dulu-pernah-jaya-di-asean-kini-bangkrut> diakses pada tanggal 18 Oktober 2024

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, “Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-berakhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses tanggal 27 November 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Adil”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul> diakses tanggal 1 Oktober 2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kepailitan”,
<https://kbbi.web.id/pailit>, 12 Mei 2024

Tesis

Bravika Bunga Ramadhani, “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PT Prudential Life Insurance)”, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009

Imam Akbar Dinata, “Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum”. Tesis. Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

Santosa, “Perlindungan Hukum Bagi Kurator atas Imbalan Jasa dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 704 K/Pdt.Sus/2012)”. Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Trisakti, 2018

Wulandari, “Ratio Decendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terkait Peniadaan Upaya Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”. Tesis, Malang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023

Disertasi

Indra Sakti, “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan”. Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2023

Mohammad Amrullah, “Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka dan Efektif”, Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

Rita Anggraini, “Perlindungan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Pembagian Harta Pailit Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum”. Disertasi, Jambi: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024